

Hasil Penelitian

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDIDIKAN MELALUI KEUNGGULAN POTENSI DAERAH

(IDENTIFICATION OF EDUCATION NEEDS THROUGH PREDOMINANCES OF REGIONAL POTENTIAL)

Irham Iskandar

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh
Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.26, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh 24415, Aceh - Indonesia
e-mail: irhamis@yahoo.com

Diterima: 30 Juli 2019; Direvisi: 19 Januari 2020; Disetujui: 19 Maret 2020

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pendidikan apa yang sesuai dengan keunggulan potensi daerah, yaitu melalui tipologi klassen, pendekatan pola hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dan location quotient. Metode penelitian adalah penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan temuan penelitian atau teori-teori sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni maupun ilmu terapan dan sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Data ini berupa laporan tahunan statistik perekonomian Aceh tahun 2012-2016 yang berupa data PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi pendidikan yang sesuai dengan potensi di daerah tertinggal yaitu Kabupaten Aceh Singkil seperti pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan informasi, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial; Kabupaten Aceh Selatan seperti konstruksi, informasi dan komunikasi, serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; Kabupaten Aceh Utara seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; dan industri pengolahan; Kabupaten Aceh Barat Daya seperti konstruksi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya; Kabupaten Aceh Tamiang seperti perikanan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; serta jasa lainnya; Kabupaten Nagan Raya seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta pertambangan dan penggalian; dan Kabupaten Aceh Jaya seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

Kata kunci: tipologi klassen, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, location quotient

ABSTRACT

The main objective of this research is to identify what education is in line with the advantages of regional potential, namely through specific typologies, approaches to the pattern of economic growth relations and the human development index and location quotient. Method research is development research, namely research aimed at developing research findings or previous theories, both for the purposes of pure science and applied sciences and so on. The data used in this study is secondary data in the form of data in the form of annual reports on Aceh economic statistics in 2012-2016 in the form of GRDP data, economic growth, per capita income, human development index obtained from the Central Statistics Agency. The results of the study show that the identification of education is appropriate to the potential in disadvantaged areas, namely Aceh Singkil District such as electricity and gas procurement, financial and information services, government administration, land and compulsory social security, as well as health services and social activities; South Aceh Regency such as construction, information and communication, as well as government administration, land and compulsory social security; North Aceh Regency such as agriculture, forestry and fisheries; mining and excavation; and processing industry; Southwest Aceh District such as construction; health services and social activities; and other services; Aceh

Tamiang Regency such as fisheries, forestry and fisheries; mining and excavation; and other services; Nagan Raya Regency such as agriculture, forestry and fisheries; and mining and quarrying; and Aceh Jaya Regency such as construction, transportation and warehousing, as well as government administration, defense and compulsory social security.

Keywords: *typology Klassen, economic growth, human development index, location quotient*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari segi kuantitas dan kualitasnya (Nugroho, 2014). Kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pendidikan dan kesehatan. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap yang memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia.

Implikasinya, dengan semakin tinggi pendidikan, maka hidup manusia akan menjadi semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan makin tinggi produktivitasnya dan dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terdapat tiga perspektif yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial (Nugroho, 2014).

Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang hadiah Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, juga pemenang hadiah nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini. Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi.

Pada tahun 70-an, teori ini mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas

pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Maka, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya non-formal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari Meyer (1977) dan Collins (1979).

Akan halnya teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan kelas menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini didukung antara lain oleh Bowles dan Gintis (1976).

Subroto (2014) mengemukakan bahwa pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik dan diakui keberadaannya. Buku terakhir Schweke, "Smart Money: Education and Economic Development" (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Karenanya, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan

pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi

beban sosial politik bagi pemerintah. Kondisi Aceh tergambar dari distribusi tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Tenaga Kerja dan PDRB Sektoral

No.	Sektor	Jumlah Pekerja	Porsi Pekerja	PDRB (juta)	Porsi PDRB	Produktivitas/ Kapita (juta)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	735,063	35.22	32,362,773.00	24.18	44.027
2	Pertambangan dan Penggalian	18,681	0.90	8,091,869.60	6.05	433.160
3	Industri Pengolahan	123,588	5.92	6,113,905.30	4.57	49.470
4	Listrik, Gas, dan Air	8,004	0.38	212,021.80	0.16	26.489
	Bangunan	138,894	6.66	12,156,675.80	9.08	87.525
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	391,536	18.76	19,697,745.10	14.72	50.309
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	100,128	4.80	13,067,471.20	9.76	130.508
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	33,708	1.62	24,684,268.90	18.44	732.297
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	537,443	25.75	17,470,079.50	13.05	32.506
	Total	2,087,045	100	133,856,810	100	64.137

Sumber: BPS Aceh (2017)

Tingginya jumlah tenaga kerja di suatu sektor tidak selalu berarti bahwa sektor tersebut memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto. Tabel 1 memperlihatkan urutan porsi kontribusi terhadap produk domestik regional bruto di Aceh yang tertinggi berasal dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan (24,18%); kemudian diikuti oleh sektor usaha persewaan dan jasa perusahaan (18,44%); sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi (14,72%); sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (13,05); sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (9,76%); sektor konstruksi (9,08); sektor pertambangan dan penggalian (6,05%); sektor industri pengolahan (4,57%); sektor listrik, gas dan air minum (0,16%), sedangkan kontribusi kelima sektor tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja berturut-turut adalah 35,22%; 1,62%; 18,76%; 25,75%; 4,80%; 6,66%; 0,90%; 5,92%; dan 0,38%. Hal ini menunjukkan urutan ranking kontribusi PDRB tidak harus sama dengan urutan ranking kontribusi serapan tenaga kerja.

Demikian juga, dengan produktivitas per kapita rata-rata dari masing-masing sektor dapat dihitung dari hubungan antara PDRB dan jumlah tenaga kerja sektoral. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, sektor usaha persewaan dan jasa perusahaan memiliki nilai produktivitas per kapita paling besar, yakni 732 juta rupiah per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari PDRB per kapita rata-rata yang senilai 64, 137 juta rupiah per tahun. Sektor-sektor lain yang memiliki nilai PDRB per kapita di atas nilai rata-rata secara berturut-turut adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi; serta sektor konstruksi.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan produktivitas per kapita tentunya pola padat modal cenderung akan memberikan angka produktivitas per kapita yang relatif lebih tinggi dibandingkan pola padat karya. Hal ini yang terjadi di Aceh, dimana sektor yang menjadi produktivitas yang tinggi terdapat pada sektor yang padat modal yaitu sektor usaha persewaan dan jasa perusahaan. Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut sangat strategis dilakukan.

Berdasarkan persoalan-persoalan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengidentifikasi pendidikan apa yang sesuai dengan keunggulan potensi daerah, yaitu melalui tipologi kelas, pendekatan pola hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia serta location quotient.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi umumnya merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang terkait dengan proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada satu saat saja/kurun waktu yang sebentar.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan terkait aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya 10 atau 20 tahun dan bahkan lebih lama.

Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendorong setiap warga negara untuk mandiri berwirausaha secara adil dan sehat (Subroto, 2014).

Selain itu, studi tentang investasi sumber daya manusia yang dilakukan Schultz (1961), menyatakan bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Meningkatnya sumber daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan, sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan.

Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Istilah welfare dependency merupakan keadaan di mana seseorang atau rumah tangga yang sangat bergantung pada tunjangan kesejahteraan dari pemerintah untuk pendapatan mereka dalam jangka waktu lama, dan tanpanya mereka tidak

akan mampu untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Istilah tersebut sangat kontroversial, sering membawa konotasi menghina bahwa penerima tidak bersedia untuk bekerja (Bane and Ellwood, 1996).

Studi-studi empiris tentang hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para ahli, seperti Idrees (2013) melakukan evaluasi pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan selama periode 1960 hingga 2010 dan diperoleh adanya pengaruh positif berbagai jenjang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan. Sejalan dengan hal tersebut, Erygit (2012) mengkaji hubungan jangka panjang antara belanja pendidikan-kesehatan, belanja pertahanan, dan pertumbuhan ekonomi di Turkey dengan menggunakan data seri waktu untuk periode 1950-2005. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, sementara belanja pertahanan mempunyai pengaruh negatif. Juga terdapat trade-off antara belanja pendidikan-kesehatan dan belanja pertahanan.

Ibourk (2013) juga menginvestigasi sejauh mana ketidakmerataan pendidikan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan menunjukkan index gini mengalami penurunan di semua negara, yaitu laki-laki dan perempuan dan semua kelompok umur. Ini menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan.

Lebih lanjut, Meng (2013) menunjukkan bahwa selama lebih 20 tahun antara 1988 dan 2009 penghasilan nyata rata-rata pekerja laki-laki perkotaan di China telah meningkat 350%. Tapi terjadi pula peningkatan ketidakmerataan penghasilan yang besar antara mereka yang mempunyai ketrampilan dan mereka tidak punya ketrampilan.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data berupa laporan tahunan statistik perekonomian Aceh tahun 2017 yaitu: PDRB; pertumbuhan ekonomi; pendapatan per kapita; dan, indeks pembangunan manusia. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota daerah tertinggal berdasarkan tipologi kelas.

Guna memudahkan analisis secara spasial, maka teknik analisis yang akan digunakan adalah tipologi kelas untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur. Pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita

menurut tipologi Klassen disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Laju pertumbuhan ekonomi	
	Laju Pertumbuhan di Atas Rata-Rata	Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-Rata
IPM di Atas Rata-Rata	Daerah Maju	Daerah Tertekan
IPM di Bawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal

Sumber: Sjafrizal (2014)

Tabel 3. Klasifikasi Pendapatan Per Kapita menurut Tipologi Klassen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pendapatan per Kapita	
	Pendapatan per Kapita di Atas Rata-Rata	Pendapatan per Kapita di Bawah Rata-Rata
IPM di Atas Rata-Rata	Daerah Maju	Daerah Tertekan
IPM di Bawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal

Sumber: Sjafrizal (2014)

Selanjutnya untuk mengetahui pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, maka perhitungan menggunakan formula korelasi rank Spearman (Riadi, 2016). Formula korelasi peringkat spearman sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \left(6 \sum D^2 / n(n^2 - 1)\right)$$

Keterangan:

rs : Koefisien korelasi rank order; 1 dan 6: bilangan konstan

D : perbedaan antara pasangan jenjang; n : jumlah sampel

Bila koefisien korelasi rs bernilai nol, maka tidak ada korelasi, dan bila rs bernilai positif satu atau negatif satu, maka terdapat korelasi sempurna.

Penentuan potensi daerah dianalisis menggunakan *Location Quotient (LQ)*, untuk menganalisis sektor potensial atau basis dalam perekonomian di suatu daerah. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Hasil perhitungan LQ ini hanya digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu daerah dan tidak digunakan untuk proyeksi.

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sector. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ

tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria.

$$LQ = \frac{\frac{S_i}{N_i}}{\frac{S}{N}}$$

Dimana :

Si : Jumlah PDRB sektor kegiatan ekonomi i di kab/kota yang diselidiki

S : Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi di kab/kota yang diselidiki

Ni : Jumlah PDRB sektor kegiatan ekonomi i di provinsi

N : Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi di provinsi

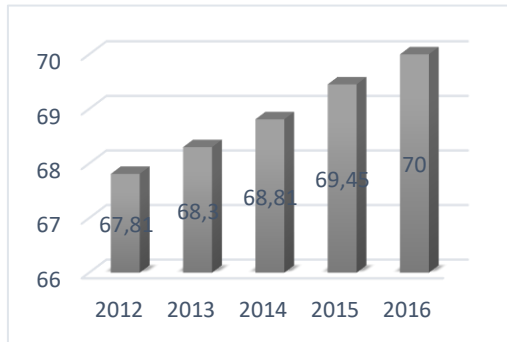
Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah: a) Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah acuan; b) Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan; dan, c) Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

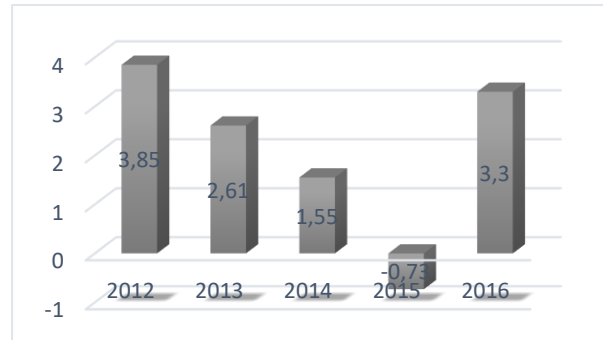
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Pembangunan manusia di Aceh terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat

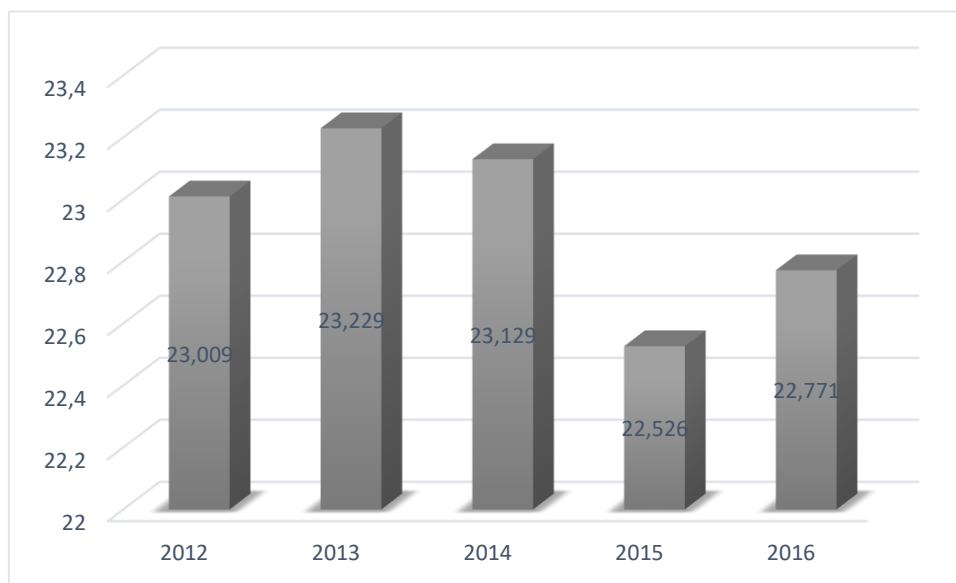
sejak tahun 2012 hingga 2016 seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: BPS Aceh (2017)



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BPS Aceh (2017)



Gambar 3. Pendapatan per kapita
Sumber: BPS Aceh (2017)

IPM Aceh telah mengalami kenaikan sebesar 2,19 poin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Aceh yang dilihat semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pembagian kategori IPM untuk membedakan capaian antarwilayah dikelompokkan menjadi: kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Dengan metode penghitungan IPM yang baru, sejak tahun 2010, IPM Aceh berada pada kategori sedang.

Akan tetapi bila dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka terlihat jelas bahwasannya peningkatan IPM masih belum berdampak pada laju pertumbuhan. Pada Gambar 2 terlihat penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,85 (2012) menjadi sebesar -0,73 (2015) dan kemudian naik kembali sebesar

3,30 (2016). Namun kenaikan ini masih rendah, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi 2012.

Demikian juga bila ditinjau dari pendapatan per kapita, maka peningkatan IPM masih belum berdampak pada pendapatan per kapita dan kalau pun ada berdampak masih relatif rendah, seperti disajikan pada Gambar 3.

Berdasarkan pengelompokan daerah ke dalam empat kuadran. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Terlihat bahwa tipologi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) daerah yang termasuk dalam klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi adalah Kabupaten Aceh Tengah, Pidie, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Langsa. Hal ini sekaligus menguatkan posisi teratas dalam pertumbuhan ekonomi daerah; 2) daerah yang berada pada kuadran kedua dengan klasifikasi pertumbuhan

ekonomi tinggi dan IPM rendah adalah Kabupaten Simeulue, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Subulussalam; 3) daerah yang berada dalam klasifikasi daerah dengan IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Kota Lhokseumawe; dan, 4) daerah yang termasuk dalam Pertumbuhan dan IPM yang rendah yaitu

Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Nagan Raya dan Aceh Jaya. Berdasarkan analisa empat kuadran terlihat bahwa daerah yang kaya akan sumber daya alam justru memiliki angka IPM dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya nilai IPM ini terkait pula dengan indikator pembentuk IPM.

Tabel 4. IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Laju pertumbuhan ekonomi	
	Laju Pertumbuhan di Atas Rata-Rata	Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-Rata
IPM di Atas Rata-Rata	Daerah Maju	Daerah Tertekan
	Kab. Aceh Tengah Kab. Pidie Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa	Kab. Aceh Besar Kab. Bireuen Kota Lhokseumawe
IPM di Bawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal
	Kab. Simeulue Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Gayo Lues Kota Subulussalam	Kab Aceh Singkil Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Tamiang Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya

Sumber: BPS Aceh (2017)

Tabel 5. IPM dan Pendapatan Per Kapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pendapatan per Kapita	
	Pendapatan per Kapita di Atas Rata-Rata	Pendapatan per Kapita di Bawah Rata-Rata
IPM di Atas Rata-Rata	Daerah Maju	Daerah Tertekan
	Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Besar Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe	Kab. Pidie Kab. Bireuen Kab. Pidie Jaya Kota Langsa
IPM di Bawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal
	Kab. Aceh Barat	Kab. Simeulue Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kota Subulussalam

Sumber: BPS Aceh (2017)

Hubungan analisis tipologi daerah didasarkan indeks pembangunan manusia dan pendapatan per kapita, diperoleh tipologi daerah yang berbeda. Klasifikasi empat kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM tinggi (kuadran I) yaitu: Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Besar, Kab. Bener Meriah, Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe; 2) daerah dengan pendapatan tinggi dan IPM rendah (kuadran II) yaitu: Kabupaten Aceh Barat; 3) daerah dengan IPM tinggi dan pendapatan per kapita rendah (kuadran III) yaitu Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Pidie Jaya, Kota Langsa; dan, 4) kelompok terakhir mempresentasikan daerah dengan IPM dan pendapatan per kapita rendah (kuadran IV) yaitu: Kab. Simeulue, Kab Aceh Singkil, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, dan Kota Subulussalam.

Tabel 5 mendeskripsikan bahwa Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Besar, Kab. Bener Meriah, Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe tergolong dalam daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi. Selain itu dari hasil pemetaan tersebut menarik untuk diamati adalah daerah yang tergolong dalam kuadran kedua. Secara teori daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan memiliki nilai IPM yang tinggi pula, namun hal tersebut belum terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Walaupun pendapatan per kapita daerah tersebut tinggi akan tetapi IPMnya justru relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita yang tinggi mengalami ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan analisis regresi, ditemukan korelasi antara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,873, karena nilai signifikansi (2-tailed) $0,873 >$ lebih besar dari

0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan (berarti) antara variabel laju pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia.

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa rentang koefisien korelasi r yang bernilai (-0.280) memiliki hubungan yang sangat lemah. Masih rendahnya kontribusi kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sumber daya manusia terutama untuk kesesuaian keahlian dengan potensi daerah yang dimiliki. Sejalan dengan penelitian Sukanto (2007) yang menyatakan bahwa rendahnya hubungan (r) antara nilai kinerja perekonomian dengan kualitas sumber daya manusia (IPM) yaitu sebesar 0,125 atau 12,5 persen, dapat pula disimpulkan bahwa kinerja perekonomian belum mampu mendukung kualitas SDM. Memang dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kinerja perekonomian yang baik mampu meningkatkan kualitas SDM yang baik, tetapi juga sebaliknya yaitu karena kualitas sumber daya manusia yang baik maka kinerja perekonomian akan menjadi baik.

Berdasarkan kedua tipologi kelas di atas, maka kabupaten/kota yang dipilih sebagai sampel adalah daerah tertinggal (kuadran IV) yaitu yang memiliki IPM rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, dan pendapatan per kapita rendah. Seperti disajikan pada Tabel 6. Alasan memilih daerah tertinggal, agar pemerintah provinsi dan daerah fokus meningkatkan kesejahteraan melalui langkah-langkah kebijakan berdasarkan kesesuaian potensi daerah dengan pendidikan sebagai upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, daerah yang tertinggal secara perlahan-lahan dapat mendekati daerah yang berada di kuadran I. Adapun sektor unggulan potensi daerah berdasarkan daerah tertinggal disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Penentuan Sampel

Tipologi Klassen		Daerah Tertinggal
IPM dan Pertumbuhan Ekonomi	IPM dan Pendapatan Per Kapita	
Kab. A. Singkil, A. Selatan, A. Barat, A. Utara, A. Barat Daya, A. Tamiang, Nagan Raya, A. Jaya	Kab. Simeulue, A. Singkil, A. Selatan, A. Tenggara, A. Timur, A. Utara, A. Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Subulussalam	Kab. A Singkil, A. Selatan, A. Utara, A. Barat Daya, A. Tamiang, Nagan Raya, dan Aceh Jaya

Tabel 7. Sektor Unggulan dari Hasil Analisis LQ

No.	Kabupaten	Sektor
1.	Kab. A. Singkil	Pengadaan listrik dan gas; Jasa keuangan dan informasi; Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; serta Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
2.	Kab. A. Selatan	Konstruksi; Informasi dan komunikasi; serta Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.
3.	Kab. A. Utara	Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan penggalian; dan Industri pengolahan
4.	Kab. A. Barat Daya	Konstruksi; Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta Jasa lainnya
5.	Kab. A. Tamiang	Perikanan, kehutanan dan perikanan; Pertambangan dan penggalian; serta jasa lainnya
6.	Kab. Nagan Raya	Pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta Pertambangan dan penggalian
7.	Kab. A. Jaya	Konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib

Adapun pengembangan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah kedepan adalah pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan jangka pendek seperti sekolah-sekolah kejuruan. Wagiran (2010) menyatakan bahwa pengembangan SMK berbasis potensi daerah penting dilakukan guna mewujudkan pendidikan yang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan diversifikasi lapangan kerja bagi lulusan.

Lebih lanjut, untuk pendekatan jangka panjangnya seperti perguruan tinggi. Ini sangat penting, karena untuk menciptakan output yang berkualitas (keahlian) dan siap terjun kepasar kerja senantiasa perlu mendapat perhatian pengelola perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan klasifikasi tipologi dan melihat hubungan antara indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta analisis LQ di Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di kabupaten tersebut masih belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat setempat.

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk mengantisipasi, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi sektor unggulan agar pendapatan masyarakat meningkat, seperti di Kabupaten Aceh Singkil dengan sektor pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan informasi, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial; Kabupaten Aceh Selatan dengan sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; Kabupaten

Aceh Utara dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian; dan industri pengolahan; Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sektor konstruksi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya; Kabupaten Aceh Tamiang dengan sektor perikanan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta jasa lainnya; Kabupaten Nagan Raya dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian; dan Kabupaten Aceh Jaya dengan sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

REKOMENDASI

Memperhatikan kesimpulan diatas, maka perlu adanya rekomendasi yang penting bagi kebijakan daerah, yaitu:

1. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bersama-sama mensinkronisasi kebutuhan pendidikan dengan potensi daerah;
2. Menyepakati program/kebijakan yang disusun; dan,
3. Menyusun roadmap pendidikan di Aceh serta regulasinya untuk mendukung hal tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim, M.Pd atas segala saran dan data yang telah diberikan selama penulisan artikel ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga dan teman-teman semua atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang diberikan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bowless, S. And Gintis, H. 1976. "Schooling in Capitalist America Revisited." *Sociology of Education* 75 (1), hal 1-18

Collins, R. 1979. *The Credential Society*. New York: Academic Press.

Erygit, S. B. 2012. The long run linkages between education, health and defence expenditures and economic growth: evidence from Turkey. *Defence & Peace Economics* 23 (6) hal 559-574.

Ibourk, A. d. 2013. Inequality in education and economic growth: empirical investigation and foundations- evidence from Mena region. *International Journal of Economics & Finance* hal 111-124.

Idrees, A. J. 2013. Modeling the impact of education on the economic growth: evidence from aggregated and disaggregated time series data of Pakistan. *Economic Modelling*, 383-388.

Mary Jo Bane and David T. Ellwood. 1996. *Welfare Realities From Rhetoric to Reform*. Harvard University Press.

Meyer, JW. 1977. The Effect of Education as an Institution. *America Journal of Sociology*. 83 hal 55-77

Nugroho, SBM. 2014. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Media Ekonomi dan Manajemen*. 29(2).

Riadi, E. 2016. *Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS)*. Penerbit Andi.

Schultz, Theodore W., 1961. Investment in Human Capital. *American Economic Review* 36 (3) hal 12

Schweke, William. 2004. Smart Money, Education and Economic Development. [Online] Dari: http://www.epi.org/publication_smart_money, [Diakses: 7 Juli 2014].

Soebyakto, BB dan Abdul B. 2015. Analisis Tipologi dan Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13(1) hal 21 – 36.

Subroto, G. 2014. Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20(3).

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Sukanto. 2007. Analisis Daya Saing Antar Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Tesis Program Pascasarja Universitas Sriwijaya.

Wagiran. 2010. Pengembangan Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Daerah dan Sumberdaya Alam dalam Mendukung Continuing Vocational Education. Seminar Internasional Aptekindo.

Xin Meng, K. S. 2013. Economic reform, education expansion, and earnings inequality for urban males in China, 1988-2009. *Journal of Comparative Economics* hal 227-244.